



Jawa Barat



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2017



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2017, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementrian/ Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

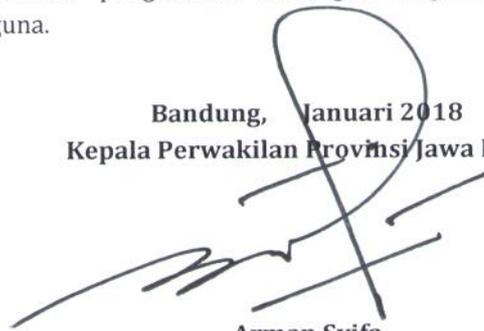
Pengukuran Kinerja Tahun 2017 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditetapkan dan di tandatangani pada tanggal 11 Januari 2017 di Magelang, Jawa Tengah. Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2017.

Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian kinerja ini diharapkan sudah menggambarkan kondisi real pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi yang tepat untuk merencanakan kegiatan dalam tahun berikutnya sehingga semua IKU yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target.

Akhir kata, tugas BPK RI sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK RI yang bebas, mandiri dan profesional. Selanjutnya Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari BPK RI yang tidak terpisahkan akan terus meningkatkan perannya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berhasil guna.

Bandung, Januari 2018
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Arman Syifa

NIP. 19690404 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	3
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	5
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	5
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)	18
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK RI sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2016-2020 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada September 2016. Laporan Kinerja ini berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini juga merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 2017 dan Laporan Kinerja BPK RI Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

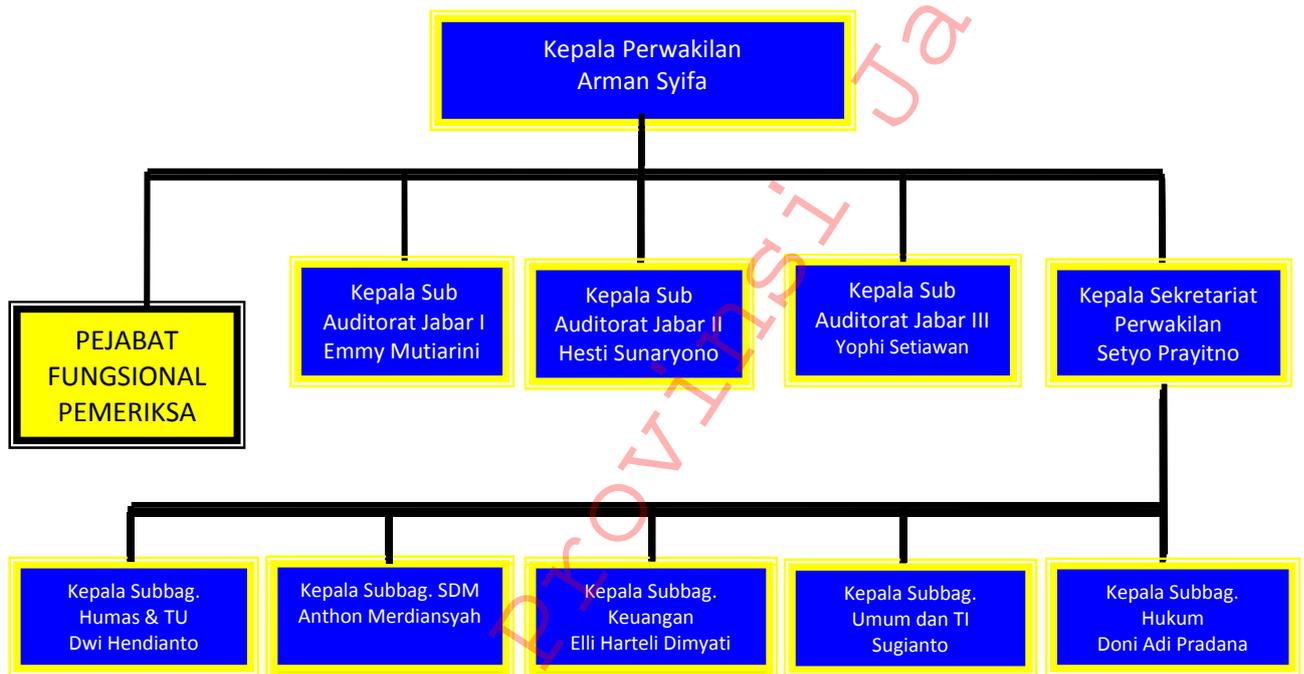
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI. Berdasarkan Keputusan tersebut, tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Jawa Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Jawa Barat berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Jawa Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh Pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan aparat pengawas internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
13. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Sub Auditorat Jawa Barat I

Sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Sub Auditorat Jawa Barat II

Sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Sub Auditorat Jawa Barat III

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

4. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per bulan Desember 2017 berjumlah 199 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 3 orang Kepala Subauditorat, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 5 orang Kepala Subbagian, 118 orang staf fungsional/teknis dan 71 orang staf penunjang pendukung. Pagu anggaran Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2017 sebesar Rp40.927.582.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.372.666.958,00 atau 91,31% dari total anggaran.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Visi : "Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi :

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, terdapat 2 (dua) tujuan strategis yang akan dicapai pada akhir pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016 – 2020, yaitu :

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara;
2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung tujuan strategis yang akan dicapai, maka BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan satu Sasaran Strategis (SS), yaitu:

SS 1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan

Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “Meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Di mana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

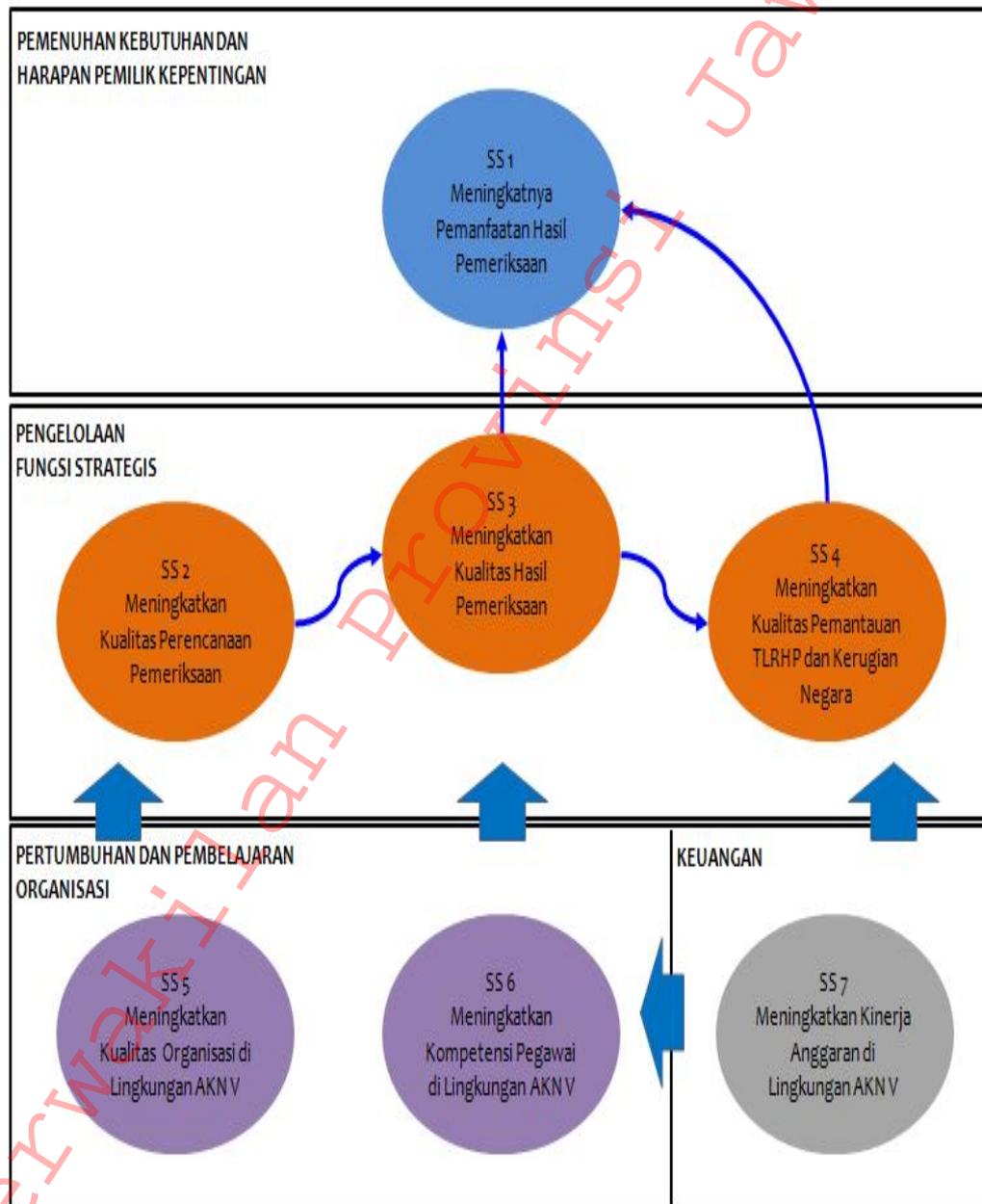
Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra 2016 – 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi yang berwenang/instansi penegak hukum, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), warga negara Indonesia, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

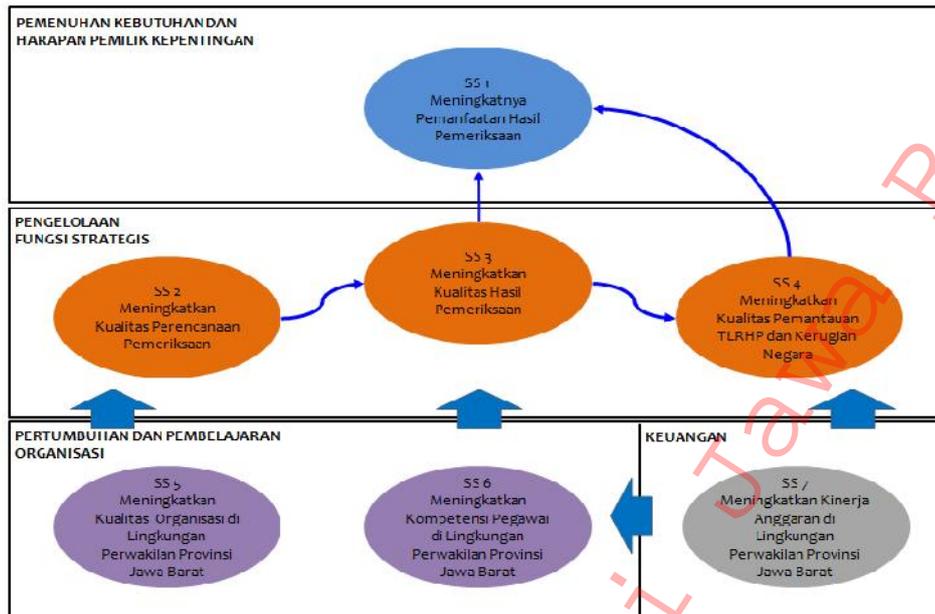
Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dinilai melalui survei

atas indeks kepuasan pemangku kepentingan, serta persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sasaran Strategis BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat digambarkan dengan Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Peta strategis tersebut merupakan turunan dari Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan pendukung pencapaian sasaran strategis AKN V. Berikut adalah Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V dan Peta Strategi Perwakilan Provinsi Jawa Barat :



Gambar 2.1 – Peta Strategi Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK



Gambar 2.2 – Peta Strategi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dari Peta Strategi di atas, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat memiliki peranan dalam mewujudkan Sasaran Strategis BPK dengan menetapkan sembilan sasaran strategi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus ditetapkan pencapaian targetnya sebagai berikut:

SS	Indikator Kinerja	
SS 1	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
	1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
	1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH
	1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara
	1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
	1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
SS 2	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
	2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP
	2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

SS	Indikator Kinerja	
SS 3	3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan
	3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
	3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP
SS 4	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
	4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
SS 5	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
	5.3	Persentase Penyusunan Best-Practice
	5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice
	5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat
	5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan
	5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
	5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
SS 6	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
	6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
SS 7	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) pada setiap tahunnya selama periode lima tahun. Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%
	IKU 2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 3. Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%
	IKU 2. Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	15%	16%	17%	18%	20%
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 1. Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56
	IKU 3. Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A
	IKU 2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3. Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	0	0	0	0
	IKU 4. Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
	IKU 5. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 7. Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2

Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
		2016	2017	2018	2019	2020
	IKU 8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 2. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	92%	93%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (d.h.i. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 11 Januari 2017. Berikut adalah IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017, yaitu :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
			Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
			Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	17%	berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	
	IKU 3.6	Persentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan menang	100%	
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah	
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56		
IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%		
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI
	IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan humas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
	IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Pegawai
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan diklat pegawai
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	82%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

Perubahan dan Perbedaan PK Tahun 2016 dan PK Tahun 2017

Dalam PK Tahun 2017, terdapat beberapa perubahan IKU dan penambahan IKU baru, yang semula pada Tahun 2016 berjumlah 26 IKU, di Tahun 2017 menjadi 28 IKU, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. Perubahan IKU

- a. Pada PK Tahun 2016, untuk IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK di SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan, sedangkan pada PK Tahun 2017 menjadi: IKU 3.4 pada SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan.
- b. Pada PK Tahun 2016, untuk IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, sedangkan pada PK Tahun 2017 menjadi: IKU 1.2 tetap pada SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan.
- c. Pada PK Tahun 2016, untuk IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP di SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan, sedangkan pada PK Tahun 2017 menjadi: IKU 3.5 pada SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan.

2. Penambahan IKU baru

- a. IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang, dan
- b. IKU 5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

Dalam rangka mencapai target IKU Tahun 2017 yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017, yang menetapkan target kinerja setiap triwulanan selama satu tahun. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

(1)	Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2017	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Keterangan
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	65%	65%	65%	65%	Desember	
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU bonus
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU bonus
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	IKU bonus
IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0	0	1	Desember	
SS2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IKU 2.1	Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	0%	85%	85%	85%	Desember	
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	0	0	0	16%	Desember	Sesuai Revisi RKP yang telah dietujui, semula akan diterbitkan 7 LHP Kinerja pada TW IV, menjadi 8 LHP Kinerja , sehingga persentase yang semula 16% menjadi 17%
SS3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	0	100%	100%	100%	Desember	
IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	0	3,7	3,7	3,7	Desember	
IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0	100%	100%	100%	Desember	
IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	0	100%	100%	100%	Desember	
SS4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IKU 4.1	Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	0	28	28	56	Desember	

IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	
SS5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan								
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	A	0	0	0	A	Oktober	IKU Tahunan dalam bentuk indeks/nilai evaluasi oleh Itama yang realisasinya ada di bulan Oktober
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	50%	50%	60%	80%	Desember	
IKU 5.3	Jumlah Usulan Best-Practice	0	0	0	0	0	Desember	IKU bonus
IKU 5.4	Persentase Penyebaran Best-Practice	0%	0%	0%	0%	0%	Desember	IKU bonus
IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100%	100%	100%	Februari	
IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
IK 5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	0	1	1	2	Desember	
IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	70%	80%	90%	95%	Desember	
IK 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
SS6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan								
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	
IK 6.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa)	90%	15%	45%	70%	90%	Desember	
SS7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan								
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	82%	15%	45%	65%	82%	Desember	

Namun demikian, pada semester II Tahun 2017 terdapat revisi atas Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) yaitu semula akan diterbitkan 7 LHP Kinerja pada TW IV, menjadi 8 LHP Kinerja untuk Tahun 2017 sehingga mempengaruhi IKU 2.2 (Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP) yang sebelumnya target adalah 16% menjadi 17%. Oleh karena itu, rincian Sasaran target IKU Tahun 2017 (setelah revisi RKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (setelah revisi RKP)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	17%
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%
	IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
	IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	82%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 berdasarkan hasil validasi Triwulan IV (semester II) Tahun 2017 adalah 99,03. Skor kinerja Tahun 2017 ini menunjukkan peningkatan skor sebanyak 2,88 poin jika dibandingkan skor Tahun 2016 sebesar 96,15. Peningkatan skor kinerja ini terutama disebabkan karena:

1. sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai atau melebihi target yang ditentukan dengan skor kinerja 100 s.d. 105;
2. sebanyak 7 (tujuh) IKU dengan skor <100 (62,16 s.d. 96,97);
3. terdapat satu IKU bonus (IKU 1.5) yang tidak terdapat realisasinya. Namun demikian, dikarenakan IKU bonus, maka ketiadaan realisasi tidak mengurangi skor kinerja (skor IKU tetap 100);
4. terdapat satu IKU tidak dapat diukur pencapaiannya (IKU 3.3) walaupun terdapat target atasnya karena data atas IKU tersebut tidak tersedia, dan
5. terdapat dua IKU (IKU 5.3 dan IKU 5.4) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan dan merupakan IKU bonus.

Skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor Kinerja
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,23%	94,20
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	101%	101
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	103%	103
IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	17%	17,39%	102,29
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor Kinerja
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100
IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	N/A	N/A
IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,31	105
IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	62,16%	62,16
IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
IKU 4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	67,86%	67,86
IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	75,69%	94,61
IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	0%	N/A
IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	N/A
IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100
IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	83,33	83,33
IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	4,9	105
IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	102,23
IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	88,52%	88,52
IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	87,27%	96,97
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	82%	86,40%	105

Capaian tersebut tidak terlepas dari upaya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adapun uraian lebih rinci mengenai pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk semua sasaran strategis sebagai berikut:

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan enam IKU, yaitu IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, IKU 1.3 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara, IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, dan IKU 1.5 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

1. IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan.

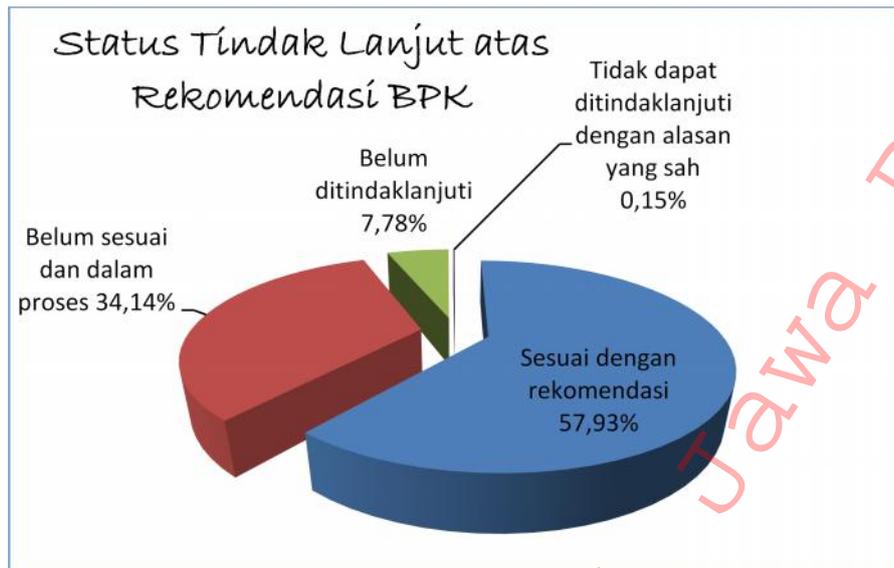
Rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran BPK RI dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.2. Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase (%)
1	Sesuai dengan rekomendasi	4.934	61,06%
2	Belum sesuai dan dalam proses	2.681	33,18%
3	Belum ditindaklanjuti	452	5,59%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	13	0,16%
	Jumlah Rekomendasi yang disampaikan	8.080	100,00%



Gambar 3.1. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK

Pencapaian atas IKU 1.1 - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk tahun 2017 mencapai 61,23% dari 65% target yang ditetapkan dengan skor 94,20.

Perkembangan capaian IKU 1.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IKU 1.1 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,23%	94,20	100,29	N/A

Capaian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 61,23%. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penurunan capaian tersebut disebabkan kurangnya komitmen dari beberapa Kepala Daerah. Oleh karenanya untuk tahun 2018, jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan melakukan upaya-upaya perbaikan dan upaya persuasive kepada masing-masing Kepala Daerah, antara lain melalui kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang akan dilakukan setiap semester selama kurun waktu tahun 2018 dengan Pemerintah Daerah dan Inspektorat Daerah di wilayah Jawa Barat. Selain itu, penurunan capaian tersebut juga dipengaruhi dengan adanya kenaikan target tahun 2017, yaitu yang semula target sebesar 60% pada tahun 2016, kemudian target dinaikan menjadi sebesar 65% pada tahun 2017.

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.1. Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	75%	61,23%

2. IKU 1.2 - Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mandat tersebut mengisyaratkan peran BPK yaitu pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Untuk tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum ada penyampaian LHP yang mengandung unsur pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH).

Perkembangan capaian IKU 1.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 1.2 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	N/A

Meskipun capaian IKU 1.2 pada tahun 2017 adalah 100%, walaupun tidak ada penyampaian LHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH selama kurun waktu 2017, tetapi IKU ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. IKU 1.3 – Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut mewajibkan BPK untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian negara. Selama tahun 2017, terdapat satu Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan dan disampaikan kepada IPH, yaitu :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Kegiatan Penyaluran Kredit Mikro Utama Linkage Executing Non BPR kepada Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) pada Bank BJB KC Sukabumi Tahun 2012

Perkembangan capaian IKU 1.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian IKU 1.3 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	101%	101	102	N/A

IKU 1.3 ini merupakan IKU bonus, sampai dengan Desember 2017 realisasi atas IKU ini mencapai 101% yang melebihi target PK Tahun 2017, yaitu 100%. Namun demikian IKU ini capaian IKU ini kurang dari capaian tahun 2016 walaupun masih diatas 100%, hal ini dikarenakan selama kurun waktu tahun 2017 hanya ada 1 permintaan PKN dan yang telah diterbitkan dalam bentuk LHP PKN.

Perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%	101%

4. IKU 1.4 - Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Pemberian keterangan ahli ini diberikan berdasarkan LHP BPK dan dilakukan dalam rangka mendukung pemberantasan praktek korupsi atas keuangan negara.

Untuk tahun 2017, terdapat 3 (tiga) permintaan Pemberian Keterangan Ahli oleh Pengadilan maupun APH yang dapat dipenuhi oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Perkembangan capaian IKU 1.4 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU 1.4 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	103%	103	100	N/A

Untuk IKU 1.4 ini merupakan IKU bonus. Artinya tidak tercapainya target IKU pada IKU ini tidak akan berdampak pada pengurangan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sedangkan apabila tercapai dan melebihi target akan menambah skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Perbandingan realisasi IKU 1.4 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	103%

5. IKU 1.5 - Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang

Pemberian pendapat merupakan salah satu kewenangan BPK yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat BPK RI adalah pendapat yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat/Daerah, DPD, DPRD, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan lembaga atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK RI dapat mencakup antara lain perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam memberikan pendapat, maka seluruh satker pemeriksaan termasuk Perwakilan Provinsi Jawa Barat di dorong untuk memberikan masukan kepada Ditama Revbang.

Selama tahun 2017 terdapat satu usulan bahan pendapat dari Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang telah disetujui dan dimanfaatkan oleh Ditama Revbang, yaitu: "Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan". Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga pencapaian untuk IKU 1.5. ini adalah 1 dengan skor 100. Perkembangan capaian IKU 1.5 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU 1.5 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100	100	N/A

Perbandingan realisasi IKU 1.5 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	1

SS.2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 2.1 - Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, dan IKU 2.2 - Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP.

1. IKU 2.1 - Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan

IKU 2.1. ini mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan revisi atas RKP Tahun 2017 sebanyak 3 kali, hal ini dikarenakan adanya penambahan output dari Pemeriksaan Kinerja (mengikuti Tematik Pemeriksaan Kinerja pada AKN V dan AKN VI) dan output LHP PKN/D serta output LHP DTT, namun penambahan atas output tersebut tanpa menambah anggaran.

Perkembangan capaian IKU 2.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian IKU 2.1 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105	100	N/A

Perbandingan realisasi IKU 2.1 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	88%	90%	90%	95%

2. IKU 2.2 – Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK RI merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas aspek ekonomi dan efisiensi operasi serta aspek efektivitas (3E) dalam pencapaian hasil yang diinginkan.

Tujuan IKU 2.2 ini adalah untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Realisasi Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan dalam Tahun 2017 mencapai 8 LHP dari seluruh jumlah LHP yang diterbitkan selama tahun 2017 yaitu sebanyak 46 LHP (non Banpol dan PKN).

Gambar 3.2. Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017



Perkembangan capaian IKU 2.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian IKU 2.2 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	16% Menjadi 17% (karena ada revisi output RKP)	17,39%	102,29	102,30	N/A

Perbandingan realisasi IKU 2.2 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	15% menjadi 22% (karena ada revisi output RKP)	16% Menjadi 17% (karena ada revisi output RKP)	17%	18%	20%	17,39%

SS.3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 3.1 - Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan, IKU 3.2 - Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, IKU 3.3 - Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, IKU 3.4 - Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK, IKU 3.5 - Ketetapan Waktu Penyampaian LHP, dan IKU 3.6 - Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang

1. IKU 3.1 – Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dalam rangka mengendalikan mutu pemeriksaan. Pemenuhan skor atas IKU 3.1 dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Untuk tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan *Quality Control* sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, dengan skor 100.

Perkembangan capaian IKU 3.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKU 3.1 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100	100%	N/A

Perbandingan realisasi IKU 3.1 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. IKU 3.2 – Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

Quality Assurance dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu (*quality control*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *Quality Assurance* dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu dan dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Sama dengan QC, pemenuhan skor atas IKU 3.2 ini dilakukan dengan pengisian kuesioner atas kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan oleh Pemberi Tugas Pemeriksaan (PTP), Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP), dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP).

Pada tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IKU 3.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU 3.2 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100	100	100

Perbandingan realisasi IKU 3.2 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. IKU 3.3 – Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP

IKU ini menunjukkan tingkat akurasi dan konsistensi dalam penyusunan LHP agar LHP tidak mengandung kesalahan (*zero defect*) dan 100% akurat. Konsistensi dan akurasi merupakan syarat mutlak dalam penyajian LHP untuk menghindari adanya gugatan oleh pihak-pihak terkait.

Perkembangan capaian IKU 3.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian IKU 3.3 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	N/A	N/A	55,33	N/A

Untuk tahun 2017, IKU ini tidak dapat diukur pencapaiannya walaupun terdapat target atas IKU tersebut, hal ini karena data atas IKU tersebut tidak tersedia. Sehingga capaian kinerja tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas IKU 3.3 - Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, tidak dapat diukur.

Perbandingan realisasi IKU 3.3 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	N/A

4. IKU 3.4 – Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Pengendalian mutu ini antara lain dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Pencapaian atas IKU 3.4 - Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK untuk tahun 2017 mencapai 4,31 dari target indeks sebesar 3,70 yang ditetapkan dengan skor 105.

Perkembangan capaian IKU 3.4 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian IKU 3.4 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,31	105	105	N/A

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.4. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,6	3,6	3,6	4,31

5. IKU 3.5 – Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas pemeriksaan/stakeholder berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun program pemeriksaan. Pengukuran IKU ini dilakukan atas jenis pemeriksaan keuangan, PDTT (tidak termasuk Banpol dan PKN), dan kinerja pada periode tertentu.

Pencapaian IKU ini dalam Tahun 2017 adalah 62,16% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 62,16. Tidak tercapainya IKU ini dikarenakan penyelesaian Hasil Pemeriksaan pada Triwulan II tidak semuanya dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, terlambatnya penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dikarenakan beberapa entitas yang terlambat menyerahkan LK *Unaudited*, terdapat beberapa permasalahan di lapangan pada saat pemeriksaan, serta pertimbangan kehati-hatian dalam penyusunan LHP oleh Tim Pemeriksa.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha selalu berkoordinasi dengan entitas, sehingga diharapkan untuk tahun 2018, penyerahan LK *Unaudited* oleh entitas tidak terlambat atau terkendala, sehingga pelaksanaan pemeriksaan LK dan penyerahan/penyampaian LHP dapat tepat waktu.

Perkembangan capaian IKU 3.5 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian IKU 3.5 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	62,16%	62,16	65,82	N/A

Perbandingan realisasi IKU 3.5 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.5 Ketepatan Waktu Penyerahan LHP	100%	100%	100%	100%	100%	65,82%

6. IKU 3.6 - Persentase LHP yang Digugat dan BPK dinyatakan Menang

IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan. IKU ini baru diterapkan tahun 2016 pada IKU level BPK Pusat, sedangkan di BPK Perwakilan baru diterapkan pada tahun 2017.

IKU ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah saji atau tiada salah saji (*zero defect*) pada LHP, sehingga dapat memitigasi resiko LHP yang digugat dan BPK dinyatakan kalah. Jika ada LHP yang sampai digugat dan BPK dinyatakan kalah, berarti menunjukkan bahwa kualitas LHP itu kurang baik. Namun jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak

ketiga atas suatu gugatan terhadap LHP, maka berarti LHP tersebut berkualitas dan sudah sesuai dengan SPKN.

Sebagai permulaan, capaian IKU ini dalam Tahun 2017 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IKU 3.6 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian IKU 3.6 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK dinyatakan Menang	100%	100%	100	N/A	N/A

Sementara itu, perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingkan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK dinyatakan Menang	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%

SS.4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis ini diukur dengan tiga IKU, yaitu IKU 4.1 – Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, IKU 4.2 - Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, dan IKU 4.3 - Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang.

1. IKU 4.1 – Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

Pencapaian IKU ini dalam Tahun 2017 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Perkembangan capaian IKU 4.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian IKU 4.1 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
4.1	Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100 %	100%	100	100	N/A

Perbandingan realisasi IKU 4.1 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
4.1 Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. IKU 4.2 - Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan. IKU 4.2 bertujuan untuk mendorong Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah sejumlah 56 LHP dengan skor kinerja 100. Nilai IKU 4.2 ini telah mencapai target yang ditetapkan sejumlah 56 LHP.

Perkembangan capaian IKU 4.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IKU 4.2 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100	100	N/A

Perbandingan realisasi IKU 4.2 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	56	56	56	56

3. IKU 4.3 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Merupakan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan Perwakilan ke Ditama Revbang (d.h.i Direktorat EPP) dengan tembusan Ditama Binbangkum. Bertujuan untuk mengukur ketepatan penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara dengan tepat waktu.

Pencapaian IKU ini dalam tahun 2017 adalah 67,86% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 67,86.

Perkembangan capaian IKU 4.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IKU 4.3 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	67,86%	67,86	62,50	N/A

Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti Kerugian negara/daerah yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah sejumlah 56 LHPT Runeg, namun demikian penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2017 yang disampaikan tepat waktu kepada Ditama Revbang hanya 10 LHPT Runeg dari yang seharusnya 28 LHPT, hal ini dikarenakan mundurnya pelaksanaan pemantauan kerugian negara/daerah dari jadwal sehingga penyelesaian LHPT pun tidak sesuai jadwal seharusnya.

Untuk tahun 2018, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berupaya lebih meningkatkan ketepatan waktu penyampaian LHPT Runeg ke Ditama Revbang dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan pemantauan dengan batas waktu yang ditetapkan dalam penyampaian LHPT, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 100%.

Perbandingan realisasi IKU 4.3 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	67,86%

SS.5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan delapan IKU, yaitu IKU 5.1 - Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, IKU 5.2 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 5.3 - Jumlah Usulan *Best-Practice*, IKU 5.4 - Persentase Penyebaran *Best-Practice*, IKU 5.5 - Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, IKU 5.6 - Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan, IKU 5.7 - Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan, IKU 5.8 - Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, dan IKU 5.9 - Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

1. IKU 5.1 - Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, maka Perwakilan Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) setiap tahunnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat, LAK ini akan dievaluasi oleh Inspektorat Utama secara periodik.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama No. 292m/ND/XI/10/2016, tanggal 30 Oktober 2017 perihal: Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 81,95 atau dengan kategori "A" (Memuaskan). Dengan demikian, capaian atas IKU 5.1 telah sesuai dengan target Tahun 2017, yaitu "A".

Perkembangan capaian IKU 5.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian IKU 5.1 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100	100	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.1 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	A	A	A	A

2. IKU 5.2 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi mendukung ketersediaan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya untuk meningkatkan dukungan teknologi informasi dilakukan dengan mengintegrasikan sistem, database dan jaringan teknologi informasi yang diprioritaskan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam organisasi.

Mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh dari pemanfaatan TI dan tingginya biaya untuk membangun infrastruktur TI, maka membudayakan "IT Culture" di lingkungan organisasi merupakan syarat mutlak. Untuk itu, beberapa aplikasi TI dijadikan indikator dalam mengukur capaian IKU 5.2 yaitu: SISDM, pemanfaatan e-mail, e-drive, SMP, portal BPK dan portal e-Audit.

Pencapaian IKU ini dalam tahun 2017 adalah 75,69% atau kurang dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan skor 94,61.

Perkembangan capaian IKU 5.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian IKU 5.2 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	75,69%	94,61	79,36	100

Target IKU 5.2 pada tahun 2017 belum tercapai sesuai target. Hal tersebut disebabkan masih banyak pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memanfaatkan e-mail dan e-drive internal BPK. Adapun pemanfaatan portal e-Audit maupun portal BPK tidak maksimal dikarenakan sebagian besar pemeriksa hanya mengakses portal e-Audit semata-mata untuk menguji manifest dari maskapai penerbangan tertentu. Jenis pengujian ini biasanya hanya dilakukan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan ataupun Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Namun demikian untuk pemanfaatan aplikasi SIPTL sudah mencapai 100% dimanfaatkan dalam rangka pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Rincian tingkat pemanfaatan TI Tahun 2017 di Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum	Layanan Aplikasi Pemeriksaan		
e-mail (20%)	e-drive (10%)	Portal (5%)	SISDM (30%)	SMP (15%)	e-audit (15%)	SIPTL (5%)
69,27%	58,40%	100%	88,02%	97,30%	33,33%	100%

Perbandingan realisasi IKU 5.2 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	80%	100%	100%	100%	75,69%

3. IKU 5.3 – Jumlah Usulan *Best-Practice*

IKU 5.3 digunakan untuk mengukur penyusunan jumlah *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, untuk tahun 2017, IKU ini tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan, dan IKU ini merupakan IKU bonus.

Sehingga Perkembangan capaian IKU 5.3 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian IKU 5.3 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian			Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
						2017	2016	2015
5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.3 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Uraian	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
		2016	2017	2018	2019	2020	
5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	0	0	0	0	N/A*

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

4. IKU 5.4 – Persentase Penyebaran *Best-Practice*

IKU 5.4 digunakan untuk mengukur penyebaran jumlah *best-practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. Namun demikian, untuk tahun 2017, IKU ini tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan, dan IKU ini merupakan IKU bonus.

Sehingga Perkembangan capaian IKU 5.4 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian IKU 5.4 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian			Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
						2017	2016	2015
5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.4 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.3 Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	N/A*

*) tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan

5. IKU 5.5 - Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

IKU 5.5 digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian LAK Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara tepat waktu sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK. LAK BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disampaikan kepada Kepala Ditama Revbang melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 36A/ND/XVIII.BDG/02/2017 tanggal 14 Februari 2017.

Sehingga Perkembangan capaian IKU 5.5 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23 Perbandingan Capaian IKU 5.5 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100	100	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.5 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6. IKU 5.6 – Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan

Tujuan IKU ini adalah untuk mendorong unit kerja agar menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu. Ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan adalah sesuai dengan POS Perencanaan, yaitu tanggal 10 di bulan berikutnya. Capaian IKU 5.6 Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada 2017 adalah 83,33% dengan skor 83,33, artinya BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 dalam menyampaikan laporan bulannya belum tepat waktu, hal ini karena terdapat dua penyampaian Laporan Bulanan yang terlambat dalam menyampaikan kepada Tortama KN V, yaitu Laporan bulan Januari dan Laporan bulan Juni.

Perkembangan capaian IKU 5.6 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IKU 5.6 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	83,33%	83,33	100	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.6 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%

7. IKU 5.7 – Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

Media relation dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan tugas, fungsi serta peran BPK kepada *stakeholders* BPK, antara lain para insan media. Media merupakan sarana yang paling efektif untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 adalah menyusun siaran pers atas kegiatan perwakilan, melaksanakan konferensi pers pada saat Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2016 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat (DPRD), Penyerahan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat TA 2016 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kegiatan Goes to School pada 28 September 2017, Media Visit ke Pemred Harian Pikiran Rakyat pada 31 Oktober 2017, Media *Workshop* pada 8 Desember 2017, dan *talkshow* melalui TVRI Stasiun Jawa Barat pada 21 Desember 2017.

Pencapaian IKU ini dalam tahun 2017 adalah 4,9 atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 2 dengan skor 105.

Perkembangan capaian IKU 5.7 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IKU 5.7 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
5.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	4,9	105	105	N/A

Perbandingan realisasi IKU 5.7 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	4,9

8. IKU 5.8 – Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja merupakan pendorong tercapainya standar kinerja yang diharapkan.

IKU ini bertujuan untuk menilai rata-rata persentase tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2017, Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mencapai pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja sebesar 97,12% atau melebihi target 95% dengan skor 102,23. Pencapaian ini meningkat dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017 Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha mempertahankan pencapaian IKU ini.

Adapun perkembangan capaian IKU 5.8 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Perbandingan Capaian IKU 5.8 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	102,23	105	101,99

Perbandingan realisasi IKU 5.8 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95%	96%	96%	96%	97,12%

9. IKU 5.9 - Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai. IKU ini merupakan IKU baru bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak ada perbandingan capaian IKU yang sama selama beberapa tahun terakhir.

Sebagai permulaan, capaian IKU ini dalam Tahun 2017 adalah 100% atau sesuai target yang ditetapkan sebesar 100% dengan skor 100.

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian IKU 5.9 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100	N/A*	N/A*

*) Belum ada dalam PK dan tidak diukur.

Sementara perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan belum tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020, sehingga diharapkan terdapat perubahan terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020. Namun demikian apabila diperbandingan untuk kurun waktu lima tahunan, maka direncanakan target sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%

SS.6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu IKU 6.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan IKU 6.2 - Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

1. IKU 6.1 – Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), standar jam pelatihan yang harus dipenuhi setiap pemeriksa per tahunnya adalah 40 jam. IKU ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pegawai pemeriksa untuk memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN.

Untuk tahun 2017, realisasi IKU 6.1 adalah sebesar 88,52% dengan skor kinerja 88,52. Nilai IKU 6.1 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan jumlah pemeriksa di Perwakilan yang tidak sebanding dengan tingginya frekuensi pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan yang harus segera diselesaikan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi tidak tercapainya jam diklat pemeriksa dengan menyelenggarakan diklat teknis (diklat pemeriksaan) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan, yaitu:

- a. Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual (tanggal 19 s.d. 20 Januari 2017);
- b. Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual (tanggal 30 Januari s.d. 3 Februari 2017); dan
- c. Diklat Pemeriksaan BLU/BLUD (tanggal 27 s.d. 30 November 2017).

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2017, target 100% pemeriksa memenuhi jam diklat tidak tercapai. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan waktu pemeriksaan.

Perkembangan capaian IKU 6.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28 Perbandingan Capaian IKU 6.1 – Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	88,52%	88,52	85,45	73,08%

Untuk tahun ke depan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan berusaha untuk meningkatkan pencapaiannya menjadi 100%. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pemeriksa minimal 40 jam dalam satu tahun. Salah satu upaya adalah melaksanakan diklat yang diselenggarakan di Perwakilan dengan persetujuan Pusediklat.

Perbandingan realisasi IKU 6.1 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	88,52%

2. IK 6.2 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa baik staf maupun pejabat struktural dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang yang diemban.

Untuk tahun 2017, capaian realisasi IKU 6.2 adalah sebesar 87,27% dengan skor kinerja 96,97. Nilai IKU 6.2 ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 90%. Kondisi tersebut disebabkan seringkali jadwal pelaksanaan diklat dilaksanakan bersamaan dengan waktu penugasan di lingkungan Sekretariat Perwakilan, selain itu diklat yang ditawarkan

bagi pegawai kurang beragam sehingga tidak banyak yang dapat dipilih sesuai tugas dan pekerjaannya di sekretariat perwakilan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi tidak tercapainya jam diklat bagi pegawai di Sekretariat (Non Pemeriksa) dengan menyelenggarakan diklat teknis yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan, yaitu: Diklat Pelayanan Prima (tanggal 14 s.d. 15 Desember 2017)

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2017, target 90% pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam diklat tidak tercapai. Untuk itu, kedepannya akan dilakukan perencanaan yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan diklat yang disesuaikan dengan jadwal dan waktu penugasan pegawai.

Perkembangan capaian IKU 6.2 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IKU 6.2 - Tahun 2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	87,27%	96,97	69,89	N/A

Perbandingan realisasi IKU 6.2 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%	87,27%

SS.7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Pelaksanaan seluruh tugas di BPK harus didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

Melalui Sasaran Strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU, yaitu IKU 7.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1. IKU 7.1- Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Tujuan IKU 7.1 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dinilai dari empat indikator, yaitu: penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Pencapaian IKU ini pada Tahun 2017 mencapai 86,40% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 82% dengan skor 105.

Perkembangan capaian IKU 7.1 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian IKU 7.1 -2015, 2016 dan 2017

IKU	Uraian	Target 2017	Realisasi 2017	Skor Capaian IKU		
				2017	2016	2015
7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	82%	86,40%	105	105	103,48

Perbandingan realisasi IKU 7.1 pada tahun 2017 terhadap Target Kinerja lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 2016-2020 adalah sebagai berikut:

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2017
	2016	2017	2018	2019	2020	
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	82%	85%	85%	90%	86,40%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan dalam mencapai kinerja tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Laporan Realisasi DIPA Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran

	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	20.928.314.000,00	18.385.674.819,00	87,85%
2	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	1.183.352.000,00	1.142.300.049,00	96,53%
3	Manajemen Sumber Daya Manusia	12.859.046.000,00	12.057.986.994,00	93,77%
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	572.209.000,00	563.148.424,00	98,42%
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	5.384.661.000,00	5.223.556.672,00	97,01%
	Total anggaran	40.927.582.000,00	37.372.666.958,00	91,31%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja yang dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang memuat baik keberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan maupun belum tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa keuangan Negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.

Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2017 adalah 99,03, dengan pencapaian sesuai target atau melebihi target untuk 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara, Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang, Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP, Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan, Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan, Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang, Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan, Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin dan Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan.

Terdapat 1 (satu) IKU bonus yaitu Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH (IKU 1.2) yang tidak terdapat realisasinya. Namun, dikarenakan IKU bonus, maka ketiadaan realisasi tidak mengurangi skor kinerja (skor IKU tetap 100).

Kemudian terdapat 1 (satu) IKU yang tidak dapat diukur pencapaiannya walaupun terdapat target atasnya yaitu IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP karena data atas IKU tersebut tidak tersedia. Selain itu, terdapat dua IKU (IKU 5.3 dan IKU 5.4) yang tidak diukur pencapaiannya karena target tidak ditetapkan dan merupakan IKU bonus.

Selain IKU yang pencapaian sesuai target atau melebihi target, terdapat 7 (tujuh) IKU yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
2. IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;
3. IKU 4.3 Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang;
4. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;

5. IKU 5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan;
6. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa; dan
7. IKU 6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Namun demikian, capaian target kinerja secara keseluruhan pada 2017 menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Permasalahan dan kendala utama yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Kurangnya komitmen dari beberapa Pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Selain itu, penurunan capaian tersebut juga dipengaruhi dengan adanya kenaikan target tahun 2017, yaitu yang semula target sebesar 60% pada tahun 2016, kemudian target dinaikan menjadi sebesar 65% pada tahun 2017.
2. Kesiapan sebagian besar entitas di Jawa Barat yang terlambat menyampaikan LK *Unaudited* kepada BPK, selain itu Tim Pemeriksaan LK banyak yang menyelesaikan LHP tidak sesuai waktu yang dijadwalkan, karena banyak permasalahan dari entitas itu sendiri, sehingga diperlukan kehati-hatian dan kecermatan dalam penyelesaian penyusunan LHP LK.
3. Sebagian besar pemanfaatan portal e-Audit digunakan untuk mengecek manifest pada saat pemeriksaan LKPD dan pemeriksaan DTT. Namun demikian, Pada triwulan III Tahun 2017, sebagian besar jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kinerja dengan memanfaatkan portal kinerja yang tidak merupakan komponen penilaian dari IKU 5.2. Selain itu banyak pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas yang belum memanfaatkan secara maksimal terhadap email dan e-drive BPK. Namun demikian pemanfaatan aplikasi SiPTL oleh para Pemeriksa sudah dimanfaatkan secara optimal, walaupun masih terkendala beberapa permasalahan diaplikasi maupun *user*, khususnya *user* dari entitas.
4. Penyampaian laporan bulanan pada periode Triwulan I dan Triwulan III belum sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 100%, dikarenakan keterlambatan penyampaian laporan bulanan untuk bulan Januari 2017 dan bulan Juli 2017 dikarenakan adanya mutase atau pergantian personil yang bertugas membuat laporan bulanan.
5. Jadwal diklat sering bersamaan waktunya dengan tugas pemeriksaan ataupun tugas kesekretariatan yang harus segera diselesaikan, serta penawaran jadwal diklat kesekretariatan yang tidak pas, sering kali jadwal diklat untuk pemeriksa maupun non pemeriksa (kesekretariatan) yang ditawarkan pada semester I, pada saat yang sama banyak pegawai pada sekretariat perwakilan diperbantukan dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan secara serentak, begitu pun dengan jadwal diklat bagi pemeriksa yang seringkali tidak sesuai atau bersamaan dengan jadwal pelaksanaan tugas pemeriksaan di lapangan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan adalah dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,23%	94,20
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	101%	101
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	103%	103
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	17%	17,39%	102,29
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	N/A	N/A
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,31	105
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	62,16%	62,16
	IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	67,86%	67,86
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	75,69%	94,61
	IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	0%	N/A
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	0%	N/A

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Skor
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	83,33%	83,33
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	4,9	105
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	102,23
	IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	88,52%	88,52
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	87,27%	96,97
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	82%	86,40%	105

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp40.927.582.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp37.372.666.958,00

**LANGKAH-LANGKAH PEMBOBOTAN UNTUK MENETAPKAN SKOR PERWAKILAN
TRIWULAN IV TAHUN 2017**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU	LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN DALAM SIMAK					
	Target	Realisasi	Skor	LANGKAH PEMBOBOTAN SKOR		
				SKOR SS	SKOR PERSPEKTIF	SKOR KINERJA
	f	g	$h = (g/f) \times 100$	$l = k \times e$	m	n
SKOR KINERJA PERWAKILAN						99,03
PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN					99,64	
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					99,64	
1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,23%	94,20			
1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00			
1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	101%	101,00			
1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	103%	103,00			
1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00			
PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS					98,25	
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan					39,73	
2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105,00			
2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	17%	17,39%	102,29			
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan					37,29	
3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	100,00%	100,00			
3.2 Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100,00%	100,00			
3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP						
3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,31	105,00			
3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	62,16%	62,16			
3.6 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100,00			
SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara					21,22	
4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00			
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100,00			
4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	67,86%	67,86			
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI					95,64	
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan AKN					61,26	
5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja AKN	A	A	100,00			
5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	75,69%	94,61			
5.3 Jumlah Usulan Best-Practice						
5.4 Persentase Penyebaran Best-Practice						
5.5 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN	100%	100%	100,00			
5.6 Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	83,33%	83,33			
5.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	4,9	105,00			
5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	102,23			
5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100,00			
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan AKN					34,38	
6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	88,52%	88,52			
6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	90%	87,27%	96,97			
PERSPEKTIF KEUANGAN					105,00	
SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan AKN					105,00	
7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan AKN	82%	86,40%	105,00			



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arman Syifa

Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Pamungkas

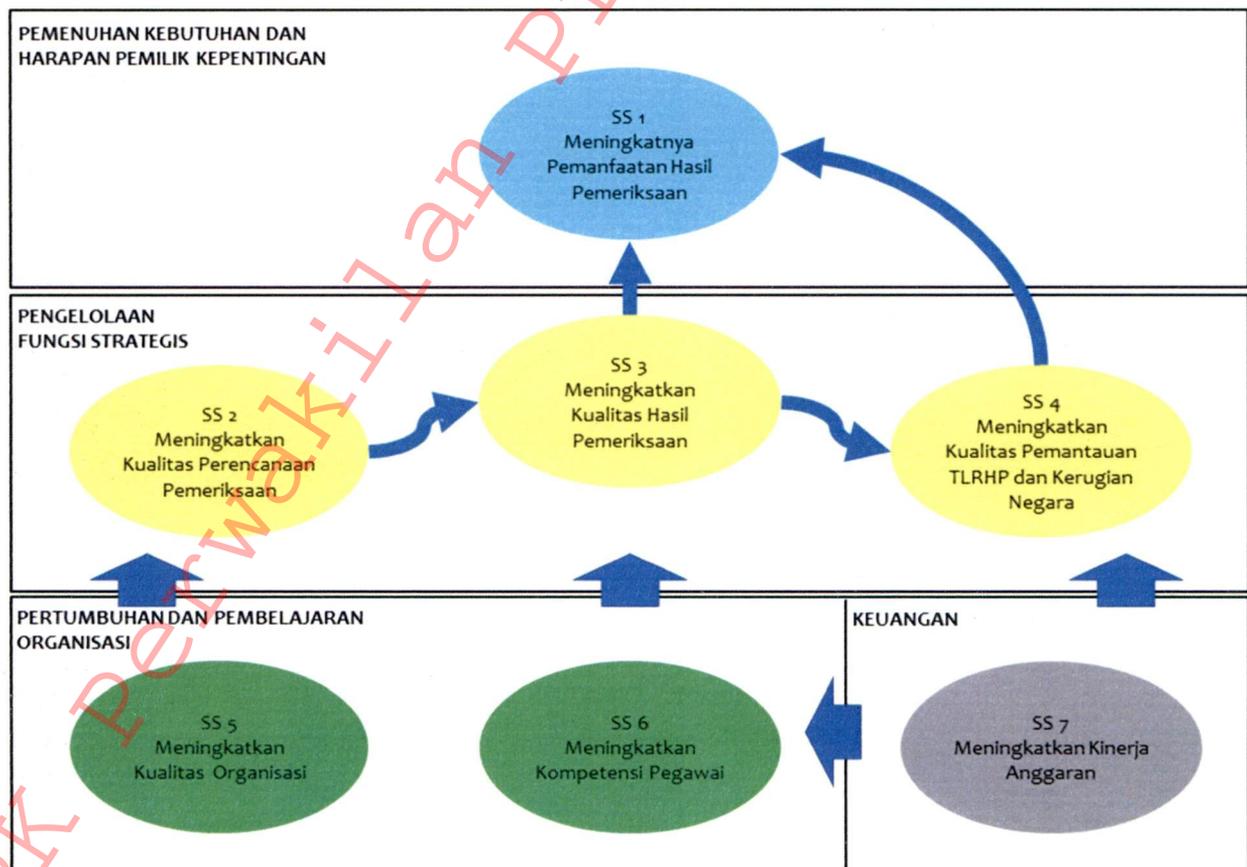
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PETA STRATEGI



IKU DAN TARGET IKU TAHUN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
SS 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan Perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
	IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
	IKU 3.6	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengompilasi kegiatan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI

	IKU 5.3	Jumlah usulan <i>best-practice</i>	0	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja Perwakilan
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	
	IK 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	
	IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IK 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
	IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	Merumuskan, mereviu dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
	IK 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik Dan Peraturan Disiplin	100%	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pegawai
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	82%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp20.928.314.000,00
Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	Rp1.183.352.000,00
Manajemen Sumber Daya Manusia	Rp12.859.046.000,00
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	Rp572.209.000,00
Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	Rp5.384.661.000,00
Total Anggaran	Rp40.927.582.000,00

Magelang, 11 Januari 2017

TORTAM KN V



Bambang Pamungkas

KEPALA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA BARAT



Arman Syifa

BPk